

# Netralitas Polri dalam Pemilu

Novel Ali<sup>2</sup>

## Abstraksi:

Sering dikemukakan kalangan yang kontra penggunaan hak pilih anggota Polri, bahwa kesuksesan pesta demokrasi di negeri ini, terutama ditentukan oleh netralitas Polri (juga netralitas TNI dan pegawai negeri sipil/PNS) di dalam pemilu itu sendiri. Kalau anggota Polri kemudian tidak punya kemampuan untuk menghindar dari perangkap politisasi terhadap profesi polisi, terutama akibat penggunaan hak pilih anggota Polri dalam pemilu mendatang, maka hubungan sipil-Polri di negeri ini akan mudah mengarah kepada relasi yang tidak produktif, di antara mereka. Netralitas anggota Polri merefleksikan kebangkitan profesionalisme Polri.

**Kata Kunci:** Netralitas, Politisasi, Profesionalisme

DEMOKRASI memang bukan segala-galanya, sepenting apapun nilai dan tujuan demokrasi itu sendiri. . Kendati pintu demokrasi membuka peluang umat manusia memberikan pelayanan politik yang bernuansa kebajikan bersama dalam kerangka persetujuan bersama di satu sisi, atau penolakan (atas dasar kesadaran pribadi dan kesadaran komunal) di sisi lain, yang semuanya sesuai harkat manusia, namun demokrasi membuka pintu kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju, ada yang menolak.

Dengan sudut pandang demikian itulah, maka dorongan harkat kemanusiaan dalam diri manusia, menyebabkan pengejawantahan (implementasi) demokrasi di 'dunia nyata', menjadi sesuatu yang lebih mudah diperbincangkan, ketimbang benar-benar dilaksanakan. Demikian pula halnya ketika sebagian politisi, negarawan, atau warga masyarakat kita,

<sup>2</sup> Novel Ali, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS); Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

menilai haram atau halalnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersikap netral dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, sebagaimana tuntutan netralitas Polri dalam Pemilu 2009.

Problema demikian muncul ke permukaan, dilandasi asumsi tidak diberikannya peluang anggota Polri mempergunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang, sebagaimana larangan sama pada pemilu-pemilu sebelumnya, merupakan pengekangan hak demokrasi sebagian warga bangsa kita sendiri, khususnya anggota Polri. Hemat mereka yang berpandangan demikian, karena pengekangan hak pilih anggota Polri bukan hanya berarti peniadaan hak demokrasi mereka, tetapi juga pembatasan hak asasi manusia, dalam diri bhayangkara negara kita tersebut. Sebab, hak pilih adalah hak politik warga negara, bagian dari hak asasi manusia. Karenanya, dengan alasan apapun, hak pilih tidak boleh ditiadakan dari keberadaan manusia, termasuk manusia yang menyandang status polisi (anggota Polri)..

Padaahal, sebagaimana diyakini banyak pihak, netralitas Polri hanya dapat diwujudkan, jika anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Tetapi, penilaian demikian mengundang kontroversi opini. Selain pendapat mereka yang setuju anggota Polri tidak menggunakan hak pilih, terdapat pula berbagai alasan yang mendasari pendapat pihak lain, yang bersikap setuju anggota Polri menggunakan hak pilih. Mereka yang disebut terakhir mengatakan, biarlah anggota Polri bersikap dan berperilaku sebagai polisi yang benar-benar profesional, sebagai konsekuensi, sekaligus resiko jabatan dan statusnya, tanpa meniadakan hak pilih, karena hak ini merupakan hak warganegara.

Tetapi, kalangan yang kontra anggota Polri menggunakan hak pilih, mendasari pendapat dan sikapnya secara sederhana. Hemat mereka, hak asasi manusia itu bukan merupakan kewajiban asasi manusia, sehingga boleh saja tidak dipergunakan.

### **Perangkap profesi**

Bukan sesuatu yang salah, jika anggota Polri mengatakan, demi tujuan yang lebih besar, kami (anggota Polri) ikhlas tidak mempergunakan hak pilih kami dalam pesta demokrasi. Adalah sesuatu yang luhur, manakala kami (anggota Polri) juga bertekad tidak menggunakan hak pilih pada pemilu di negeri kami sendiri, terutama Pemilu 2009, terutama agar pelayanan kami

sebagai polisi (negara), dan polisinya masyarakat, betul-betul dilandasi pengabdian profesi, yaitu pengabdian tanpa pamrih politik, kekuasaan, atau lain-lai sejenis.

Ini berarti, dengan tidak menggunakan hak pilih, maka pengabdian kami kepada negara dan masyarakat, tidak akan terkotak-kotak oleh aneka kepentingan yang sangat mungkin bermuara konflik. Di mana, kalau kami (sebaliknya) menggunakan hak pilih, maka keberpihakan kami kepada salah satu partai politik peserta pemilu itu, dapat mengakibatkan pelayanan kami menjadi tidak prima, sekaligus tidak profesional.

Sering dikemukakan kalangan yang kontra penggunaan hak pilih anggota Polri, bahwa kesuksesan pesta demokrasi di negeri ini, terutama ditentukan oleh netralitas Polri (juga netralitas TNI dan pegawai negeri sipil/PNS) di dalam pemilu itu sendiri. Itu sebabnya, mereka *hakkul yakin*, perlunya anggota Polri tetap tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, yang tinggal beberapa hari mendaang.

Wacana publik di Indonesia belakangan ini, memang marak dengan pro kontra penggunaan hak pilih anggota Polri dalam pemilu. Tidak cuma di kalangan non Polri, tetapi juga para petinggi Polri aktif, atau yang telah pensiun, punya pendapat tidak seragam, dalam persoalan itu. Ada yang setuju, ada pula yang terang-terangan menolak hak pilih anggota Polri pada pesta demokrasi tersebut.

Di tengah pro kontra hak pilih anggota Polri dalam Pemilu 2009, muncul skeptisisme terhadap kinerja Polri, jika (sebaliknya) anggota Polri menggunakan hak pilih. Skeptisisme ini bermuara dari kecemasan, apa dan bagaimana jadinya kinerja (*performance*) Polri, kalau anggota Polri disibukkan oleh kegiatan memanfaatkan akses politisasi legal formal dimaksud (penggunaan hak pilih)?

Namun, dan bagaimana pun, suka atau tidak suka terhadap penggunaan hak pilih anggota Polri, rakyat berhak mencemaskan kalau-kalau dampak negatif pemberian hak asasi serta peluang demokrasi tadi terhadap anggota Polri, pada gilirannya justru dapat menimbulkan perangkat politisasi bagi anggota Polri. Kalau anggota Polri kemudian tidak punya kemampuan untuk menghindar dari perangkat politisasi terhadap profesi polisi, terutama akibat penggunaan hak pilih anggota Polri dalam pemilu mendatang, maka

hubungan sipil-Polri di negeri ini akan mudah mengarah kepada relasi yang tidak produktif, di antara mereka..

Hubungan tidak produktif antara sipil dan Polri di negara kita, sebagai akibat penggunaan hak pilih anggota Polri dalam pesta demokrasi, bisa mengakibatkan kotak-kotak dukungan Polri terhadap kepentingan subyektif partai politik. Pengkotak-kotakan dukungan (politik) Polri itu, bukan mustahil dapat merusak profesionalisme Polri. Di samping – yang tidak kalah pentingnya – bisa juga melunturkan kesetiaan polisi (anggota Polri) terhadap NKRI. Iniantara lain karena mereka lebih mencintai kepentingan, serta memprioritaskan pemenuhan kepentingan partai politik yang didukungnya, dibanding prioritasasi kepentingan nasionalnya.

### **Polisi profesional**

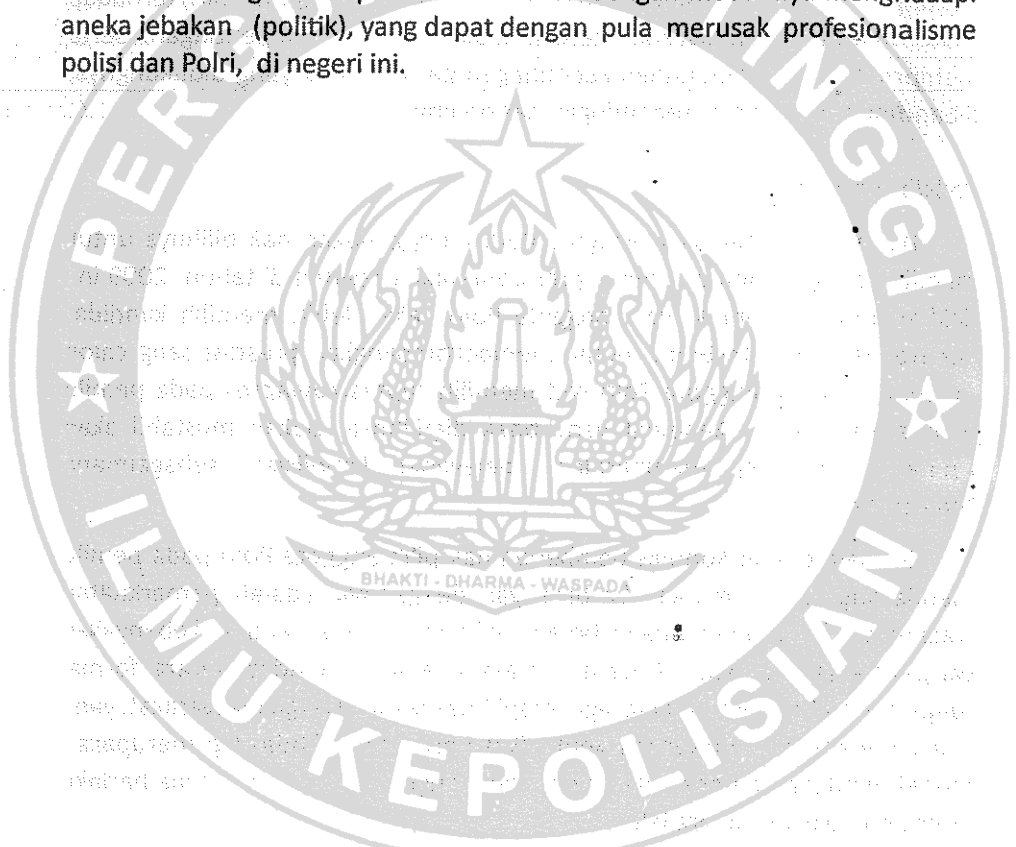
Begitu juga manakala anggota Polri menggunakan hak pilihnya untuk memilih orang, pada pemilihan presiden/wakil presiden di tahun 2009 ini, Kekhawatiran umum adalah, anggota Polri akan lebih memilih kandidat berlatarbelakang tertentu, tanpa mempertimbangkan prestasi sang calon itu sendiri. Kalau anggota Polri ikut memilih capres/cawapres pada pemilu mendatang, maka kandidat yang tidak di pilihnya, bukan mustahil akan kehilangan peluang memperoleh pelayanan kepolisian, sebagaimana seharusnya.

Sisi lain di luar konteks pemberian hak pilih anggota Polri pada pemilu mendatang, tetapi muncul berbarengan dengannya, adalah pemerkuatan wacana publik, yang selama ini berada di bawah alam kesadaran kebanyakan warga masyarakat kita. Wacana dimaksud adalah, kendati secara formal fungsi politis Polri nyaris tiada lagi, tetapi tidak sedikit warga masyarakat, yang justru merasa menjadi korban, ketika ‘kekerasan politik’ tidak lagi merupakan model pendekatan efisien dan efektif oelh anggota Polri, sebagaimana berlaku intens dan ekstens di era lalu.

Karenanya, dengan segala pertimbangan positif-negatifnya, maka ketika anggota Polri sebaiknya tetap bertekad tidak menggunakan hak pilih, dalam pemilu mendatang. Tekad itu semata-mata karena dorongan netralitas Polri di atas panggung demokrasi, memang didorong oleh pemenuhan pelayanan publik yang bersifat prima dari Polri, yang

dimungkinkan terutama jika setiap anggota Polri benar-benar bersikap netral dalam Pemilu 2009.

Sikap netral Polri dalam Pemilu 2009, memberi lebih banyak manfaat, ketimbang mudharat, bagi keseluruhan kehidupan politik nasional kita, di negeri Sebab, netralitas anggota Polri merefleksikan kebangkitan profesionalisme Polri itu sendiri. Sebaliknya, jika anggota Polri tidak bersikap netral dalam kancah politik dan demokrasi (terutama pemilu), maka bukan mustahil lembaga serta personil Polri akan dengan mudahnya menghadapi aneka jebakan (politik), yang dapat dengan pula merusak profesionalisme polisi dan Polri, di negeri ini.



sebagai...  
menjadi...  
jumlah...  
gaya...  
gaya...